

REFORMASI PENDIDIKAN UNTUK MENGURANGI PERILAKU ANARKI DAN MENUJU MASYARAKAT MADANI

Siti Irene Astuti D.

FPIPS IKIP Yogyakarta

Abstrak

Munculnya tindakan anarki di dalam kehidupan masyarakat kita, boleh jadi disebabkan oleh belum berhasilnya pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam mengantarkan warga masyarakatnya menjadi individu yang berbudaya, bermartabat, dan hidup sejahtera.

Kesalahan pemerintah dalam menerapkan sistem pendidikan nasional menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan bukan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Sistem pendidikan nasional juga telah menghilangkan kebebasan individu untuk berkehendak, dan untuk berkreasi.

Reformasi pendidikan nasional yang bertujuan untuk mendukung terbentuknya masyarakat madani menjadi penting untuk dilaksanakan. Agenda reformasi pendidikan hanya mungkin berhasil jika terjadi keterkaitan dan kerelaan semua pihak yang terlibat di dalam proses pendidikan, baik individu maupun masyarakat di dalam membentuk masyarakat manusia yang berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi di dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.

Kata kunci : anarkhisme, reformasi pendidikan nasional, masyarakat madani

REFORMATION OF NATIONAL EDUCATION TO REDUCE ANARCHY AND TO BUILD A CIVIL SOCIETY

Abstract

The acts of anarchy occurring in social life may be caused by the unsuccessful implementation of the national educational system in the course of shaping society members into cultured and dignified individuals who live well.

What has been wrong in the government's application of the national educational system has been the utilization of education as a tool to maintain authority rather than an effort of humanizing man. In so doing the national educational system has also eliminated the individual freedom of expression and creativity.

A reformation of the national education for the purpose of supporting the formation of a civil society is

therefore of utmost importance to be carried out. The educational reformation agenda can be successful only if there are interrelation among and willingness of all parties involved in the process of individual and community education in the course of forming a society of cultured and dignified persons who uphold democratic values highly in building a peaceful and prosperous society.

Pendahuluan

Hal yang ironis jika bangsa Indonesia yang selama ini hidup tenang dan damai yang berlandaskan Pancasila, tiba-tiba digoncang dengan peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan. Berbagai peristiwa yang sudah terjadi, seperti praktek DOM di Aceh, peristiwa Tanjung Priok, Lampung, 27 Juli, Dili, dan yang terjadi di Irian Jaya, bahkan menyusul juga peristiwa pertengahan Mei 1998 yang sangat traumatis, ditambah dengan peristiwa Banyuwangi, Semanggi, Ketapang, Kupang, Ambon, dan lain sebagainya.

Berbagai krisis yang sedang terjadi di negara kita, boleh jadi sebagai pemicu terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Akan tetapi, semua peristiwa yang selalu memakan korban manusia tersebut menggambarkan satu fenomena baru bahwa perilaku anarkhisme sedang terus berlangsung di dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan, perilaku anarkhisme dapat siap terjadi setiap saat jika keadaan emosional masyarakat tidak terkendali. Pada saat sekarang ada kecenderungan bahwa *emotional-behavior* tampaknya meningkat di semua lapisan masyarakat kita. Pertanyaan yang muncul dalam diri kita adalah "sajakah yang salah dalam hal ini?"

Mencari sumber pokok dan sebuah persoalan bukanlah pekerjaan yang mudah karena sebuah persoalan seringkali mengandung berbagai aspek yang bersifat kompleks. Akan tetapi, dalam mengkaji masalah perilaku manusia maka aspek pendidikan menjadi dominan dan penting untuk dikaji. Jika benar bahwa sistem pendidikan ikut berperan di dalam membentuk dasar dan perilaku anarkhisme maka dapatlah dikatakan bahwa ada yang salah dalam sistem

pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, reformasi pendidikan nasional perlu dilakukan.

Perilaku Anarkis

Pemerintah didirikan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, serta untuk melindungi rakyat dari tindak kekerasan sesama mereka maupun ancaman dari luar negeri. Dengan lain kata, anarkisme dapat diartikan tak ada ketertiban sama sekali dan tak ada perlindungan sama sekali. Anarki berarti kekacauan dan kekisruhan. Anarki diartikan sama sekali tak ada pemerintah dan sama sekali tak ada hukum (Hoffman, 1999: 463). Anarkisme adalah teori yang mengumandangkan anarki.

Salah satu ciri keyakinan anarkisme adalah semangat untuk memberontak terhadap tatanan masyarakat mapan, dan unsur inilah satu dari segelintir unsur yang diyakini semua anarkis. Pemberontakan mereka ada yang murni bersifat filosofis, ada yang berusaha mengubah tatanan masyarakat lewat cara-cara damai, ada yang berupa kekerasan agitasi, revolusi. (Hoffman, 1999: 463)

Motivasi pemberontakan mengarah ke segala kondisi sosial yang dipikirkannya menindas manusia, seperti halnya pemerintah, hak milik pribadi yang berlebihan, serta sejumlah lembaga sosial yang oleh kaum non-anarkis dianggap sebagai pilar-pilar yang adil dalam masyarakat yang tertib dan tentram.

Perilaku para anarki adalah menyerang apa yang bagi orang lain vital sehingga orang tidak dapat mentolerir anarkisme. Anarkisme pada dasarnya anti sosial sehingga tergambar perilaku yang mencerminkan kemerdekaan individual (Hoffman, 1999: 464).

Kebanyakan anarkis menghendaki terciptanya masyarakat adil dan bersatu, tetapi ada perbedaan gagasan atau ide dengan pikiran kita. Para anarkis mempunyai keyakinan bahwa manusia bisa sepenuhnya menjadi makhluk sosial, dan bila tiap individu sungguh-sungguh bebas, masyarakatnya pun akan bebas. Mereka ingin agar masyarakat diatur berdasarkan kerja sama sukarela, dan pengendalian diri oleh tiap individu sendiri, bukan lewat kekuasaan pemaksa. Mereka yakin bahwa tiap individu mampu mempertahankan ketertiban dan keadilan sosial tanpa campur tangan otoritas dari luar. (Hoffman, 1999: 466). Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa para anarkis mempercayai pada sesuatu yang dalam arti tertentu menyerupai "pemerintah", tapi "pemerintah" versi anarkis adalah pemerintah diri sendiri oleh diri sendiri, bukan pemerintah sebagian orang atas sebagian orang lainnya.

Bila kita kaji keyakinan yang dimiliki oleh para anarkis maka ada pertanyaan yang muncul dalam diri kita bahwa "bagaimana kita bisa berubah dan mengubah masyarakat bila tanpa pengarah?" Kelemahan yang dimiliki oleh para anarkis adalah ketidakjelasan tentang bentuk aturan-aturan yang dapat diberlakukan kepada individu untuk mengekang atau pun mengatur perilaku mereka. Bagaimanapun juga kebebasan yang tidak dikendalikan pada umumnya akan menghasilkan tindakan sewenang-wenang dan tak jarang menimbulkan korban manusia. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang diatur oleh hukum yang adil lebih dapat mencerminkan sebuah kebebasan, ketentraman, dan kedamaian.

Oleh karenanya, pemerintah berdasarkan hukum yang adil dapat mendorong terciptanya kebebasan. Kehidupan orang bebas menurut aturan-aturan rasional lebih menjamin terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Menurut Robert Hoffman (1999: 474), bahwa hidup menurut aturan-aturan penalaran yang tepat membebaskan manusia untuk melatih dan mengembangkan kemampuan-kemampuan alamiah. Dengan cara tersebut, kemajuan sosial dapat tercapai. Bagaimanapun, pemerintah diperlukan untuk menjamin agar tiap individu punya kesempatan untuk hidup seperti itu. Pemerintah juga diperlukan untuk merumuskan aturan-aturan, serta mengajarkannya pada orang-orang yang tak mampu merumuskannya.

Berdasarkan pemikiran Hoffman dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan yang dapat memberlakukan hukum secara adil merupakan dasar terbentuknya sebuah kebebasan yang terkendali bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata lain, tindakan anarkisme tidak akan terjadi jika di dalam masyarakat terkondisikan dengan kehidupan yang menempatkan pentingnya martabat semua manusia.

Membentuk masyarakat manusia yang berbudaya dan bermartabat bukanlah pekerjaan yang mudah. Proses pembentukan tersebut merupakan proses sosialisasi dan proses internalisasi yang berlangsung secara terus-menerus antargenerasi. Pada proses sosialisasi dan internalisasi inilah dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Sistem pendidikan nasional sebagai kerangka kerja nasional di dalam mengantarkan warganya menjadi manusia yang berbudaya dan bermartabat menjadi dasar bagi semua proses pendidikan individu yang berlangsung dalam suatu negara. Oleh karenanya, sistem pendidikan nasional ikut bertanggung jawab terhadap semua kegagalan maupun persoalan yang berkaitan dengan masalah kehidupan perilaku warga masyarakat.

Perilaku anarki yang dicerminkan dalam tindakan-tindakan yang cenderung destruktif bagaimanapun juga merupakan salah satu bentuk ketidakberhasilan sistem pendidikan kita dalam membentuk manusia yang berbudaya. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus ditinjau kembali agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Menggugat Sistem Pendidikan

Menurut Arthur Boston, ada delapan prinsip pendidikan (Frevie, 1999:200):

1. Fungsi utama pendidikan di tiap tingkat adalah untuk menyediakan pelatihan cara-cara berpikir mendasar yang terwakili dalam sejarah, ilmu pengetahuan alam, matematika, kesusasteraan, bahasa, kesenian, dan lain-lain, yang selama ini berkembang dalam pencarian pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia, perjalanan menggapai pemahaman budaya, dan upaya berkelanjutan untuk meraih kekuatan intelektual.
2. Kemampuan untuk menangani dan menerapkan gagasan-gagasan yang rumit, untuk mencarikan manfaat sejumlah pengetahuan akurat, dan untuk menguasai cara-cara ungkap yang efektif adalah kemampuan yang berharga bukan saja buat kaum cendikia atau ilmuwan, melainkan juga bernilai bagi warga negara, pelaku bisnis, pekerja terlatih, petani, dan orangtua.
3. Filosofi pendidikan yang sifatnya antiintelektual dan antidemokratik akan tampak bila ia menyatakan pelatihan yang baik dalam hal disiplin-disiplin intelektual mendasar, dan hanya layak diberikan pada minoritas, yakni siswa-siswa yang bersiap-siap masuk perguruan tinggi, dan profesi-profesi kerah putih saja, serta mengusulkan agar sisanya tidak perlu dilatih seperti itu, tetapi sebaliknya, diberi program-program yang meminimalkan sasaran intelektual.
4. Isi kurikulum pendidikan umum penting sekali artinya bagi keseluruhan hidup intelektual, ilmiah, dan profesional bangsa.
5. Disiplin-disiplin intelektual yang penting bukan hanya seberkas fakta dan seikat rumus, melainkan cara-cara berpikir dengan struktur-struktur terorganisasi.
6. Semua program pelatihan dan pemberian ijazah pada para calon guru harus menekankan kompetensi dalam bidang studi masing-masing.
7. Kebebasan menuntut adanya tanggung jawab, dan kebebasan mengajar mengisyaratkan tanggung jawab guru untuk mengetahui fakta-fakta dan menerapkan metode-metode kritis.

8. Jika kita menuntut agar pengajaran mesti memenuhi tolok ukur dalam keilmuan, ini tidaklah mengancam kebebasan mengajar. Kebebasan mengajar hanya terancam bila ada kelompok-kelompok penekan.

Meskipun pendidikan memiliki berbagai prinsip dasar, dalam proses pelaksanaannya mencerminkan berbagai kompleksitas persoalan yang belum terpikirkan sebelumnya. Sebagaimana ditulis oleh John Dewey (1997: 225) bahwa terjadi pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan antara anak dan kurikulum bisa diperluas tanpa batas yang digambarkan dalam 3 bentuk. Pertama, jagat sempit personal milik si anak *versus* jagat ruang dan waktu tanpa batas yang impersonal. Kedua, kehidupan anak yang satu dan utuh *versus* spesialisasi dan pembagian dalam kurikulum. Ketiga, ikatan-ikatan praktis-emosional dalam kehidupan anak *versus* prinsip abstrak tentang klasifikasi dan pengaturan logis. Dengan adanya *versus-versus* konflik tersebut, tumbuh sekte-sekte pendidikan yang berbeda.

Persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sesungguhnya tidak hanya berhubungan dengan proses dan hasil dari proses pendidikan itu sendiri. Akan tetapi yang lebih problematik adalah ketidakberhasilan peran lembaga pendidikan sebagai penyelenggara. Pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai perencana pendidikan nasional, mendapat berbagai kritikan tajam karena kegagalannya di dalam menerapkan sistem pendidikannya.

Berbagai kritikan tajam yang dilontarkan kepada pemerintah tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional sebagaimana ditulis oleh Joel H. Spring (1997: 501-507) antara lain adalah:

1. Pendidikan nasional di tangan negara akan menjadi pelayan kepentingan politis orang-orang yang berkuasa.
2. Pendidikan di tangan agen pemerintah akan membuka kesempatan bagi mereka untuk memanfaatkan pendidikan demi kekuasaan mereka.
3. Pendidikan dimonopoli oleh pemerintah. Dalam masyarakat industri, pendidikan cenderung untuk memenuhi kebutuhan ekonomis daripada sebagai jalan untuk memanusiakan manusia.
4. Sekolah dikendalikan oleh pemerintah dengan dikondisikan supaya patuh dan jinak.
5. Pendidikan yang dikontrol oleh pemerintah cenderung menggantikan dogma-dogma politis, dan diusahakan untuk membentuk individu menjadi warga negara yang berguna dengan

melecehkan otonomi individual, caranya batas-batas kehendak individu ditetapkan oleh negara.

6. Sekolah-sekolah yang ada, bekerja melawan kebebasan berkehendak.
7. Persekolahan haruslah menjadi proses kebudayaan dan bukan proses pendidikan. Artinya, sekolah tanpa kewajiban dan tanpa campur-tangan. Para murid bebas belajar apa yang mereka inginkan.

Keadaan pendidikan nasional di Indonesia, dewasa ini pun terperangkap di dalam sistem kehidupan yang opresif yang terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat banyak. Seperti yang diuraikan oleh H.A.R. Tilaar (1998: 26-28), bahwa ada 3 ciri utama yang dapat dicermati di dalam proses sistem pendidikan nasional:

1. Sistem yang kaku dan sentralistik.

Suatu sistem yang terperangkap di dalam kekuasaan otoriter pasti akan kaku sifatnya. Ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat, telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Hal ini mudah dimengerti karena suatu sistem yang otoriter memang menghendaki penerapan asas sentralisasi agar mudah disetir dan satu tangan. Seiring dengan itu birokrasi telah terpupuk begitu ketat sehingga segala kegiatan tinggal menunggu komando dari atas. Setiap interpretasi, setiap usaha inovasi dianggap sebagai kegiatan penghambat kemajuan sehingga sistem cenderung sangat kaku karena tidak ada tempat untuk improvisasi.

Sesuai dengan asas sentralisme, maka penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung menuruti garis petunjuk dari atas atau indoktrinasi. Segala sesuatu telah disiapkan di dalam bentuk juklak dan juknis sehingga tidak ada tempat untuk berpikir alternatif. Organisasi pendidikan diatur begitu rupa sehingga tidak ada tempat bagi suatu organisasi yang dinamis karena segala sesuatunya ditentukan dari atas dengan berkedok kepada kesatuan persepsi dan arah, kesatuan wadah, kesatuan tekad dan sebagainya.

Sistem yang kaku dan otoriter mengandung kelemahan-kelemahan dalam kepemimpinan. Mudah sekali pola kepemimpinan yang otoriter tersebut dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Bukan merupakan suatu rahasia bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional akhir-akhir ini telah dimasuki oleh praktek-praktek sektarisme yang membahayakan bagi kesatuan nasional dan keutuhan kehidupan berbangsa. Bahaya sektarisme ini sangat sulit untuk dikoreksi apabila telah bergabung dengan struktur kekuasaan yang berlaku.

2. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta koncoisme.

Sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme dan koncoisme (*cronyism*). Sebagai suatu sistem yang tertutup maka sangat mudah terjadi praktek-praktek korupsi, baik yang bersifat material maupun nonmaterial demi untuk memuaskan keinginan penguasa. Manipulasi dana masyarakat banyak sekali terjadi karena praktek-praktek korupsi yang terkait dengan kolusi di antara pejabat, baik itu untuk kepentingan organisasi politik atau kelompok maupun untuk kepentingan diri sendiri. Dengan sistem yang tertutup maka tidak jarang terjadi asas profesionalisme dikesampingkan dan diganti dengan nepotisme dan koncoisme. Memang sistem pendidikan nasional telah terperangkap dengan pekerjaan asal jadi, Asal Bapak Senang (ABS) sehingga tidak mengherankan tujuan luhur untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan nasional buyar oleh praktek-praktek tercela tersebut. Koreksi menjadi tidak mungkin, bahkan siapa yang tidak ikut membonceng mengikuti suasana (*joining the bandwagon*) maka dia akan membunuh diri sendiri. Praktek KKN yang juga telah menjadi kanker di dalam tubuh sistem pendidikan nasional dengan sendirinya telah memerosotkan mutu dan cita-cita luhur pendidikan oleh karena sumber-sumber dana yang terbatas tidak dinikmati manfaatnya oleh rakyat banyak. Pendidikan nasional bukan mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi semakin lama memperbodoh masyarakat.

3. Sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan rakyat.

Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat telah sirna, dan diganti dengan praktek-praktek yang memberatkan rakyat, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Beban kurikulum menjadi sangat berat, dan pendidikan diarahkan kepada pseudo-mutu, misalnya di dalam pembodohan masyarakat melalui praktek EBTANAS yang nilai-nilainya dimanipulasi.

Kita sedang menuntut adanya reformasi di dalam kehidupan politik. Demikian pula dalam bidang ekonomi, dan hukum serta sektor-sektor kehidupan lainnya yang keseluruhannya menuntut peningkatan keberdayaan rakyat. Rakyat yang inteligen adalah rakyat yang terbina oleh pendidikan yang bermutu sehingga dia dapat memilih kehidupan politik sesuai dengan hati nuraninya, dia dapat berdiri sendiri di dalam kehidupan ekonomi nasional yang menguntungkan rakyat kecil, dan pelaksanaan hukum yang berlaku

untuk semua orang demi kebaikan bersama dan bukan untuk segolongan kecil penguasa.

Dengan keadaan sistem pendidikan yang demikian itu, tak heran jika bangsa kita saat ini menghadapi berbagai persoalan bangsa yang besar dan kompleks, diantaranya persoalan rendahnya moralitas bangsa, rendahnya rasa nasionalisme, dan patriotisme. Jika dua persoalan besar tersebut dibiarkan, maka tindakan anarki akan terus berlangsung, dan selanjutnya dapat mendorong terjadinya disintergrasi nasional. Oleh karena itu, mengkaji peran pendidikan nasional merupakan tindakan serius yang harus dipikirkan oleh semua pihak yang terkait dengan proses pendidikan bangsa.

Agenda Reformasi Sistem Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Madani

Reformasi pendidikan nasional yang didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang demokratis harus dilakukan. Masyarakat demikian adalah masyarakat yang terbuka yang anggota-anggotanya sadar akan hakikat kemanusiaannya, bertanggung jawab terhadap kehidupannya, dan bukan berdasarkan paksaan dari sekelompok penguasa yang hanya bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Masyarakat madani dimaksudkan yaitu bagaimana mengembangkan dan sekaligus menjaga ruang antara negatifnya kemerdekaan dan positifnya kebebasan sambil mencari bentuk baru egalitarian dan solidaritas dengan selalu menjaga kemampuan *economic self-regulation* (Cohen dan Arato melalui Moeslim Abdurrahman).

Membentuk masyarakat madani adalah cita-cita bersama dan harus diperjuangkan bersama agar terbentuk masyarakat yang bebas dari segala bentuk perilaku anarki yang mengarah pada tindakan destruktif, kriminalitas. Masyarakat madani adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian, ketenangan, ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan.

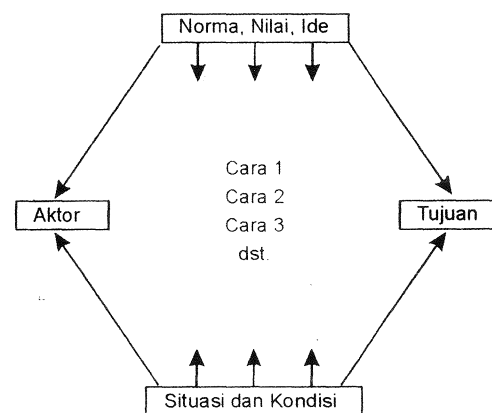
Melakukan reformasi pendidikan berarti membuat suatu kerangka kerja baru di dalam membentuk sistem nilai baru di dunia pendidikan sehingga mampu mengarahkan secara lebih tepat arah transformasi sosial menuju masyarakat madani. Menurut H.A.R. Tilaar, program reformasi yang perlu dilaksanakan meliputi sebelas agenda prioritas (1998: 31-34):

1. Pengikisan korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme.
2. Melaksanakan asas profesionalisme.

3. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dan isi kurikulum.
4. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
5. Peningkatan mutu sekolah menengah umum dan kejuruan.
6. Pendidikan mutu dan otonomi pendidikan tinggi.
7. Pengembangan pendidikan alternatif.
8. Peningkatan mutu profesi guru.
9. Pembiayaan pendidikan yang demokratis.
10. Peraturan dan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan mahasiswa.

Mencermati agenda reformasi yang ditawarkan oleh Tilaar tampaknya memerlukan dukungan masyarakat luas dan keyakinan bersama bahwa reformasi di bidang pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Untuk mengajak semua masyarakat bila reformasi pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan dinilai penting oleh semua pihak maka secara suka rela diperlukan berbagai tindakan perubahan secara teoritis. Untuk memahami perilaku sukarela ini, dapat mengacu pada teori Struktur Perilaku yang dikembangkan oleh Talcott Parson (Zamroni, 1988) sebagai berikut.



Gambar 1
Struktur Perilaku Parson's

Dalam analisis teori Struktur Perilaku Parson's bahwa pembentukan masyarakat madani sangat ditentukan oleh perilaku-perilaku individu (aktor). Dengan kata lain, keberhasilan mewujudkan masyarakat madani sangatlah ditentukan oleh keinginan semua warga masyarakat Indonesia. Bentuk perilaku warga masyarakat menuju masyarakat madani dibentuk oleh sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh semua warga masyarakatnya. Oleh karena itu, reformasi pada sistem

pendidikan nasional sebagai bagian dari proses perubahan sistem nilai harus disosialisasikan dan diinternalisasikan pada semua warga masyarakat. Di samping itu, situasi dan kondisi masyarakat yang mendukung proses perubahan menuju masyarakat madani perlu diciptakan, seperti halnya kestabilan dan keamanan masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, reformasi bidang lain seperti reformasi politik, ekonomi, hukum perlu dilakukan.

Lebih lanjut lagi, keberhasilan individu-individu di dalam membentuk masyarakat madani ditentukan pula oleh cara-cara yang dilakukannya. Dengan demikian, langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pendidikan ikut menentukan keberhasilan dalam melakukan transformasi sosial menuju masyarakat madani. Jika tidak, maka reformasi pendidikan hanya berbentuk sebuah konsep saja.

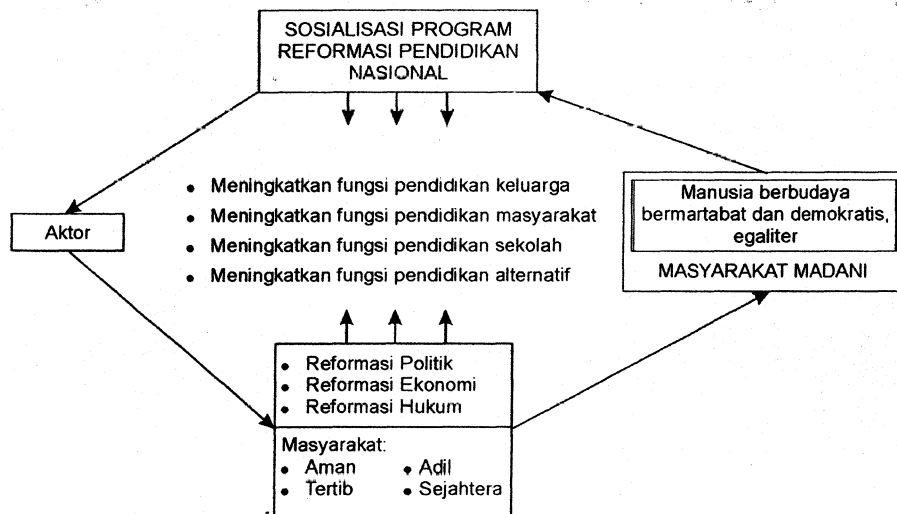
dan menciptakan ketertiban sosial harus ditingkatkan dan dioptimalkan.

Meningkatkan fungsi pendidikan sekolah

Sekolah tidak hanya mengembangkan IQ anak dan terjebak dengan target kurikulum tetapi harus memberikan perhatian untuk mengembangkan IQ anak.

Meningkatkan fungsi pendidikan alternatif

Pendidikan formal dan informal perlu dikemas lebih baik dengan mengembangkan berbagai model belajar, seperti kelas terbuka, *outward-bound*, kependuan, dan lain-lain. Pendidikan informal untuk anak-anak putus sekolah dan anak jalanan harus ditingkatkan dan diintensifkan dengan pendekatan terpadu.



Langkah-langkah konkrit yang mendukung proses pembentukan masyarakat madani adalah meningkatkan kembali peran-peran lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang selama ini cenderung belum berfungsi secara maksimal.

Meningkatkan fungsi pendidikan keluarga.

Keluarga harus kembali pada fungsi utamanya sebagai tempat yang pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak belajar keterampilan sosial, budi pekerti, pendidikan moral, dan agama.

Meningkatkan fungsi pendidikan masyarakat

Peran masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat

Kesimpulan

Kegagalan sistem pendidikan nasional di dalam menghasilkan manusia yang berbudaya, bermartabat, dan hidup sejahtera telah menghasilkan berbagai tindakan anarki yang cenderung ke arah destruktif dan bersifat kriminal.

Tindakan anarki yang disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan pendidikan karena pemerintah cenderung tidak mendukung prinsip-prinsip pendidikan, tetapi lebih banyak menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan dan mendukung kekuasaan.

Pembentukan masyarakat madani sebagai cita-cita bersama di dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai

demokratis adalah masyarakat yang menentang semua tindakan anarkisme.

Proses transformasi sosial menuju masyarakat madani perlu didukung oleh kerangka kerja nasional yang menjadi dasar perilaku warga dalam menyelenggarakan proses pendidikan masyarakatnya. Reformasi pada sistem pendidikan nasional berarti memberikan arah yang lebih jelas tentang perubahan sistem nilai pada dunia pendidikan kita yang diharapkan mampu memberi arah yang lebih tepat di dalam mewujudkan masyarakat madani yang terdiri dari individu-individu yang berbudaya, bermartabat, dan hidup sejahtera.

Transformasi sosial di bidang pendidikan akan cepat berhasil jika didukung oleh semua pihak yang terlihat dalam proses pendidikan, seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain, untuk kemudian dapat meningkatkan kembali fungsi-fungsi sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Moeslim (25 April 1999). "Peran Masyarakat Akademis sebagai bagian dan Masyarakat Madani", *Kompas*.
- Bestoor, Arthur (1999). Dasar-dasar Pendidikan dalam Paulo Freire dkk. *Menggugat Pendidikan*, halaman 200-214. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hoffman, Robert (1999). Anarkhisme dalam Paulo Freire dkk. *Menggugat Pendidikan*, halaman 463-477. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spring, Joel H. (1999). Anarkhisme dalam Pendidikan: Tradisi Para Pembangkang dalam Paulo Freire dkk. *Menggugat Pendidikan*, halaman 499-516. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Tera Indonesia.
- Zamroni (1988). *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Depdikbud.